



# LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BMKG

2025



## **Kata Pengantar**

Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Tahun 2025 dapat tersusun dengan baik.

Laporan Tahunan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi PPID BMKG dalam menjalankan tugasnya melayani permohonan informasi publik dari masyarakat. Laporan ini membuat berbagai informasi terkait kinerja PPID mulai dari jumlah permohonan informasi yang diterima dan jenis informasi yang paling banyak diminta sepanjang tahun 2025.

Penyusunan Laporan Tahunan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi berbagai pihak, terutama bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang kinerja PPID BMKG. Selain itu, Laporan Tahunan ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi PPID BMKG untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publiknya.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Oleh karenanya kami menerima kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak untuk menyempurnakan laporan PPID di masa yang akan datang.

Jakarta, 16 Maret 2026

Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama,  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama,  
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

**RR. Rara Rima Eryani S.H, S.E, M.Ec. Dev**

## A. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di BMKG

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian senantiasa meningkatkan profesionalisme dan adaptif dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan Maklumat Pelayanan BMKG.

Yaitu, *“Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.”*

Adapun Visi BMKG adalah ***“Menjadi Global Player Penyelenggara Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang Andal dan Terpercaya dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”***.

Sementara itu, Misi BMKG adalah:

1. Melaksanakan penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika berkelas dunia serta berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia, kawasan regional, dan global;
2. Mewujudkan tata kelola organisasi BMKG yang modern, mandiri, gesit (agile), efektif, efisien, dan berwawasan global serta mewujudkan SDM BMKG yang berintegritas, kompeten, profesional, berkarakter kepemimpinan yang kuat dan berdaya saing global.

Berdasarkan maklumat pelayanan, dalam rangka memberikan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kepala BMKG menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui SK No. KEP. 150/KB/VIII/2014 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BMKG. SK tersebut memuat secara general pembentukan PPID dan atasan PPID di lingkungan BMKG Pusat.

SK pertama menjadi acuan dan langkah awal dalam meningkatkan koordinasi antar PPID di BMKG Pusat. Namun, seiring berjalannya waktu dan tantangan pelayanan informasi semakin kompleks, BMKG mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika No: KEP/70/UM/KB/X/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Penerbitan perubahan SK ini mengatur secara detail tugas PPID utama BMKG Pusat dan UPT BMKG di seluruh wilayah Indonesia yang saat ini jumlahnya mencapai 192. Perubahan ini semakin mempertajam tugas dan fungsi yang melekat pada PPID pembantu dengan tujuan utama mengoptimalkan layanan untuk masyarakat luas.

Keputusan ini merupakan landasan operasional bagi Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BMKG sebagaimana telah diatur di dalam UU No. 14 tahun 2008.

Pun, PPID memiliki tanggung jawab dalam melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi di seluruh unit kerja teknis di lingkungan BMKG.

Guna mempercepat penanganan permohonan layanan informasi di lingkungan BMKG, PPID menetapkan SOP Pengelolaan Layanan Informasi Publik yaitu;

1. SOP Nomor: SOP/040/KRH/IX/2023 tentang Pendokumentasian Informasi Publik di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
2. SK Nomor: KEP.9/UM/SU/IV/2024 tentang Kode Etik Kepala, Sekretaris, Supervisor, dan Petugas Layanan Pada Unit Layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. SK Nomor: KEP.8/UM/SU/IV/2024 tentang Jam Operasional Pelayanan Pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. SOP Nomor: SOP/066/SU/V/2024 tentang Penanganan Pengaduan Layanan Informasi dan/atau Jasa Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat BMKG.
5. SK Nomor: HK.03.01/001/KRH/III/2024 tentang Standar Pelayanan Informasi dan Jasa Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Melalui Website PTSP.

Selain SOP, petugas layanan juga diberikan panduan berupa Daftar Informasi Publik (DIP) Informasi Publik Secara Berkala, Informasi Publik Setiap Saat, Informasi Publik Serta Merta, dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) sebagaimana termaktub di dalam Lembar Pemutakhiran Lembar Pengujian Konsekuensi No. 1 Tahun 2023 tentang Informasi yang Dikecualikan.

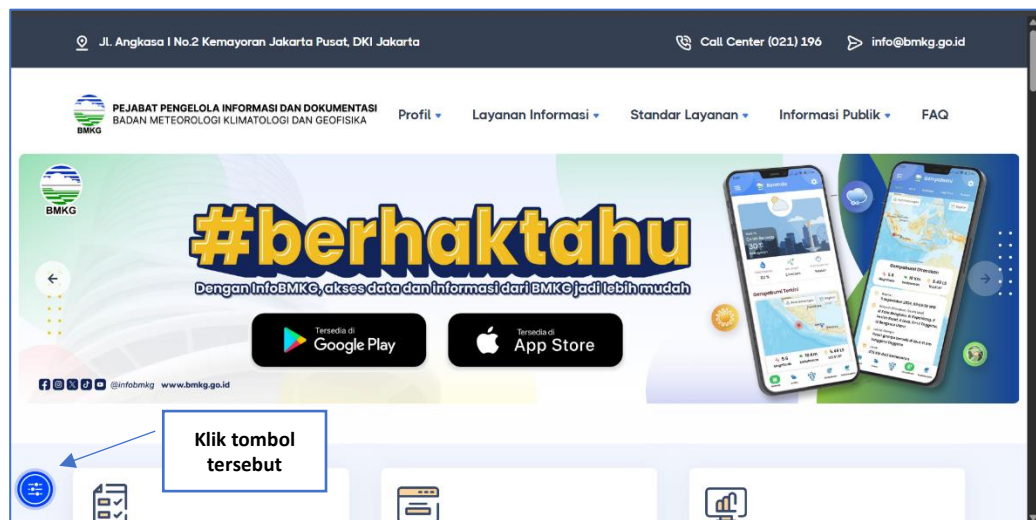
DIK bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/ atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.

## B. Bidang Pelayanan Informasi

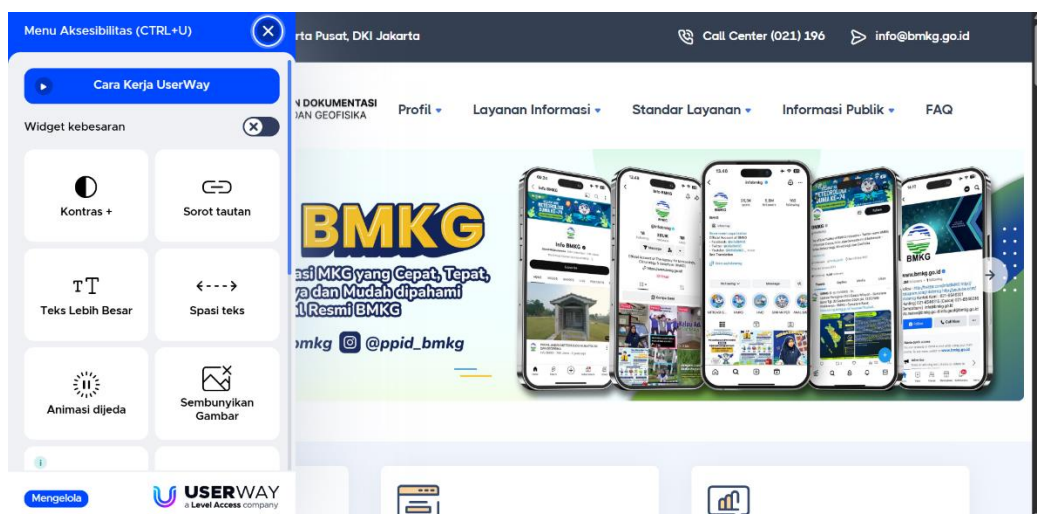
Dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat, BMKG berkomitmen untuk menjangkau semua kalangan masyarakat dan bersifat inklusif dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat. Layanan dan informasi tersebut dirancang agar dapat diakses oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas.

Fitur ini memungkinkan pengguna dengan kebutuhan khusus untuk mengakses konten dan informasi secara lebih mudah sehingga mendorong keterbukaan informasi publik yang merata tanpa hambatan. Saat ini fitur tersebut telah tersedia di website [ppid.bmkg.go.id](http://ppid.bmkg.go.id) dengan tampilan yang memudahkan pengguna dengan kebutuhan khusus untuk mengaksesnya.

Inisiatif ini sejalan dengan prinsip pelayanan publik yang setara dan berkeadilan serta mendukung pemenuhan hak informasi bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.



Gambar 1.1 Website Ramah Disabilitas PPIID BMKG



Gambar 1.2 Tampilan Website Ramah Disabilitas PPIID BMKG

Selain itu, dalam memberikan pelayanan, BMKG juga terus meningkatkan layanan terhadap masyarakat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). PTSP menjadi bidang layanan yang berperan penting untuk menunjang kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BMKG.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2016, pelayanan berupa pelayanan kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan dan penyebaran informasi serta penyediaan Jasa. Pelayanan di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terdiri atas 2 (dua) yaitu Pelayanan Publik dan Pelayanan Khusus.

Pelayanan Publik merupakan pelayanan yang bersifat rutin dan berupa informasi peringatan dini. Sedangkan Pelayanan Khusus merupakan pelayanan informasi dan atau jasa Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika khusus lainnya sesuai dengan permintaan pengguna.

Untuk meningkatkan pelayanan informasi dan atau Jasa Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika khusus serta mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau, dibentuklah unit PTSP yang berada di Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama. PTSP ada sejak tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 01 Tahun 2019, yang sebelumnya dikenal sebagai Layanan Satu Atap (LSA).

PTSP BMKG Pusat memberikan pelayanan secara langsung maupun secara tidak langsung. Pelayanan secara langsung dilakukan dengan cara tatap muka antara pengguna dengan petugas PTSP di ruang pelayanan PTSP gedung C lantai dasar - BMKG Pusat. Sedangkan untuk pelayanan secara tidak langsung dilakukan melalui media komunikasi elektronik yaitu telepon di nomor 021-65867063, Whatsapp di nomor 0813-8232-1504, contact center BMKG di nomor 196 dan surat elektronik dengan alamat [ptsp@bmkgo.go.id](mailto:ptsp@bmkgo.go.id) serta melalui website [ptsp.bmkgo.go.id](http://ptsp.bmkgo.go.id).

Adapun jumlah permohonan informasi dan jasa MKG yang telah dilayani oleh PTSP BMKG Jakarta selama tahun 2025 adalah 36 layanan dengan tarif Nol Rupiah dan informasi berbayar dengan tarif PNBK sejumlah 1.998 permohonan.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di BMKG Jakarta juga memberikan pelayanan terkait permohonan informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika untuk kegiatan pengeboran lepas pantai dan Informasi Prakiraan Cuaca khusus atas permintaan K3S yang berada di bawah SKK MIGAS maupun perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang. Ada 26 Perusahaan K3S yang sudah bekerjasama dengan BMKG dan dilayani secara rutin sesuai dengan kebutuhan yang tertuang di ruang lingkup Kontrak Kerja Sama.

Pada Tahun 2025, PTSP BMKG Pusat menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP). Kegiatan FKP diselenggarakan sebagai bagian dari komitmen PTSP Pusat dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta perbaikan berkelanjutan terhadap standar dan prosedur pelayanan. Pelaksanaan FKP mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri PANRB terkait penyelenggaraan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, FKP PTSP Pusat melibatkan perwakilan pengguna layanan, instansi terkait, serta unsur masyarakat yang berkepentingan. Seluruh masukan dan rekomendasi yang diperoleh dalam FKP telah dicatat, dievaluasi dan digunakan sebagai bahan penyempurnaan kebijakan, standar pelayanan, serta peningkatan kinerja PTSP Pusat.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat melaksanakan kegiatan pendampingan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Balai Besar BMKG Wilayah I, II, III, dan IV sebagai bentuk pembinaan dan penguatan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan BMKG. Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan FKP berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus menyelaraskan pemahaman terkait standar pelayanan, mekanisme konsultasi, serta pengelolaan masukan dari pengguna layanan. Melalui pendampingan ini, diharapkan pelaksanaan FKP di masing-masing wilayah dapat berjalan secara optimal, konsisten, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

## **Pengaduan**

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi saat ini, PTSP BMKG Jakarta sebagai salah satu Penyelenggara Pelayanan Publik dituntut untuk dapat memenuhi harapan dan keinginan masyarakat dalam melakukan pelayanan jasa dan informasi MKG. Oleh karena itu PTSP BMKG Jakarta secara berkesinambungan berusaha untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Keterbukaan informasi merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik yang mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Tidak menutup kemungkinan bahwa proses pelayanan yang dilaksanakan di PTSP BMKG Jakarta mengalami kendala yang mengakibatkan ketidakpuasan serta ketidaknyamanan masyarakat dalam proses penyelenggaraannya. Agar hal tersebut bisa segera diidentifikasi, peran serta masyarakat untuk menyampaikan/ melaporkan setiap kendala yang diketahuinya melalui sarana pengaduan layanan sangat diperlukan.

## **Mekanisme Pengaduan**

Proses pelaksanaan Penanganan Pengaduan adalah sebagai berikut:

- i. Pemohon/ pengguna layanan menyampaikan pengaduan melalui website;
- ii. Tim pengaduan PTSP BMKG Jakarta mengecek pengaduan masuk dan melakukan verifikasi dan memfilter laporan untuk segera ditindaklanjuti;
- iii. Tim pengaduan PTSP BMKG Jakarta menindaklanjuti pengaduan;
- iv. Tim pengaduan PTSP BMKG Jakarta menjawab penyelesaian pengaduan dan diinput di website untuk disampaikan kepada pemohon/ pengguna layanan;
- v. Tim pengaduan PTSP BMKG Jakarta membuat laporan penyelesaian pengaduan.

## Monitoring Pengaduan Masyarakat

Berdasarkan hasil monitoring pengaduan yang masuk pada periode 1 Januari s.d Desember 2025 terdapat 180 pengaduan masyarakat yang masuk melalui website PTSP BMKG. Berdasarkan jenisnya, pengaduan yang masuk adalah dataonline seperti; ketidaknyamanan pelanggan; complain hasil layanan yang lama; complain hasil layanan yang tidak sesuai; konsultasi pengajuan layanan data cuaca/iklim; menanyakan progress permohonan; dan permintaan revisi surat dokumen hasil.

Dalam rangka usaha monitoring dan peningkatan kualitas pelayanan di unit PTSP, dilakukan beberapa kegiatan pendukung diantaranya sebagai berikut:

1. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah memiliki sebuah sistem database berbasis website, untuk pengajuan layanan juga dapat diakses langsung melalui website itu sendiri. Berikut link website yang dimaksud <http://ptsp.bmkg.go.id> terkait tampilan website PTSP BMKG dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.4 Tampilan PTSP Online

2. PTSP memiliki Standar Pelayanan yang diharapkan mampu mewujudkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta mendorong terwujudnya checks & balances.



Gambar 1.5 Infografis Standar Pelayanan PTSP

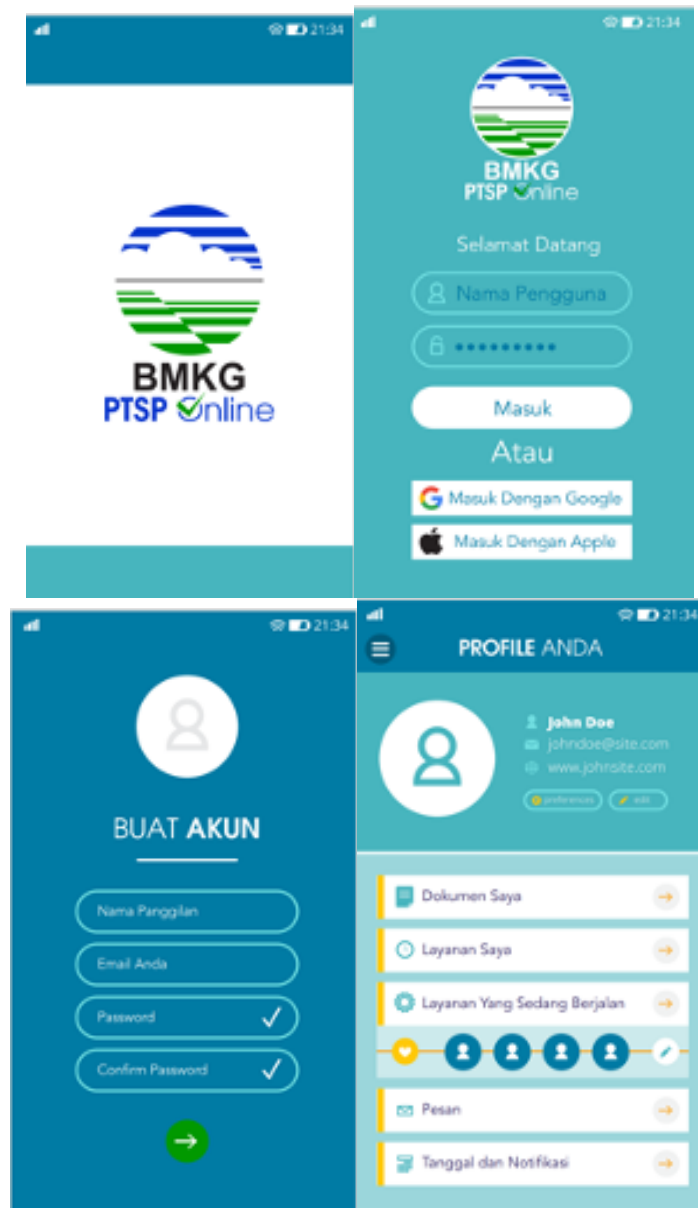
Dengan memiliki standar operasional prosedur sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan PTSP lebih jelas. Juga diharapkan dengan adanya pedoman ini dapat mencapai beberapa tujuan, yakni:

1. User mendapatkan pelayanan informasi dan jasa di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang memuaskan melalui unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
2. Kinerja SDM di bidang kehumasan, perpustakaan dan pelayanan informasi semakin meningkat
3. PTSP juga membuat mekanisme pelayanan dalam bentuk infografis untuk memudahkan masyarakat dalam memahami alur standar pelayanan PTSP.



Gambar 1.6 Infografis Mekanisme Pelayanan di website ptsp.bmkg.go.id

Untuk memudahkan masyarakat, saat ini PTSP berinovasi dengan hadir dalam bentuk aplikasi mobile PTSP berbasis android/IOS. Contoh tampilan aplikasi sebagai berikut:



Gambar 1.7 Aplikasi mobile PTSP – BMKG PTSP Online

Untuk memudahkan masyarakat, BMKG berinovasi dengan meluncurkan PTSP BMKG mobile yang bisa diunduh melalui Playstore. Saat ini bagi masyarakat yang ingin melakukan kunjungan ke BMKG bisa mengajukannya melalui aplikasi tersebut. Caranya sebagai berikut:

- Unduh aplikasi “PTSP BMKG Mobile” di Playstore.
- Buka aplikasi dan klik “Daftar” untuk membuat akun baru dan lengkapi data diri.
- Pilih “Pengajuan Kunjungan” di bagian beranda dan pilih fasilitas kunjungan yang akan dituju.

- Harap membaca Syarat dan Ketentuan sebelum pengajuan kunjungan.
- Unggah Surat permohonan kunjungan beserta nomor telepon yang dapat dihubungi di menu Buat Pengajuan.
- Tunggu informasi selanjutnya dan petugas BMKG akan menghubungi kembali.

Selain layanan kunjungan, layanan PTSP Mobile juga melayani permohonan secara khusus. Jenis layanan ini sesuai dengan PP No. 47 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku di BMKG. Adapun jenis layanan yang disediakan adalah;

- Informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- Jasa Konsultasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- Jasa Kalibrasi Alat Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- Jasa Penggunaan Alat Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- Jasa Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- Jasa Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- Jasa Penggunaan Gedung untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan/Workshop/Seminar di Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

### **Klasifikasi Jenis Informasi**

Pada tahun 2025, BMKG mengupdate jenis informasi publik yang disesuaikan dengan karakteristik informasi di setiap unit kerja dan teknis. Sementara secara umum klasifikasi jenis informasi di unit kerja teknis sebagai berikut:

#### **C. Bidang Operasional**

Sebagai Badan Publik, BMKG melayani informasi berdasarkan jenisnya yaitu Informasi Setiap Saat, Informasi Serta Merta, Informasi Berkala, dan Informasi Dikecualikan yang keseluruhannya melekat pada tugas dan fungsi di setiap kedeputan.

##### **a. Informasi Setiap Saat**

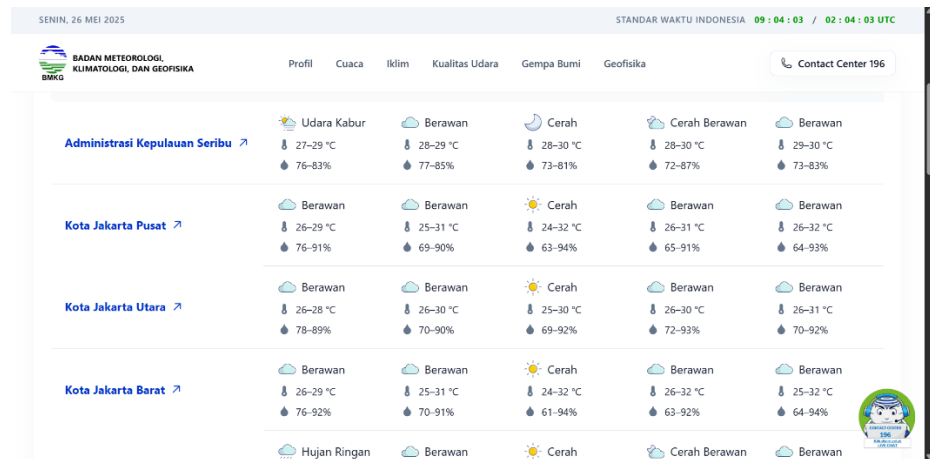
Informasi Setiap Saat adalah informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan Publik serta telah dinyatakan terbuka sebagai informasi yang dapat diakses oleh pengguna informasi bilamana ada permintaan.

- Prakiraan Cuaca

Prakiraan cuaca menjadi salah satu produk andalan yang dimiliki oleh BMKG. Di Media Sosial, setiap harinya BMKG selalu merilis informasi

prakiraan cuaca sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Tidak hanya itu, BMKG juga bekerjasama dengan beberapa stakeholder untuk memberikan informasi prakiraan cuaca di videotron.

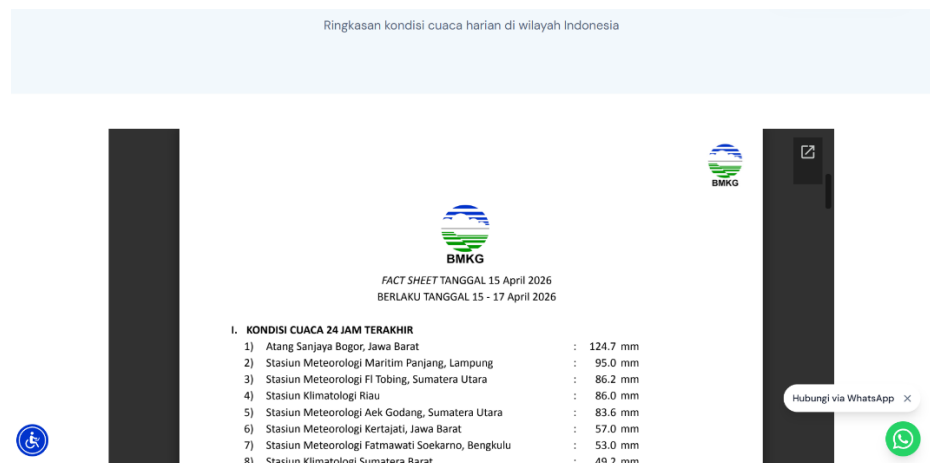
Informasi prakiraan cuaca yang diproduksi oleh BMKG antara lain, prakiraan cuaca dunia, prakiraan cuaca Indonesia, prakiraan cuaca DKI Jakarta, dan prakiraan cuaca berbasis dampak.



Gambar 1. 8 Informasi Prakiraan Cuaca BMKG

- **Prospek Cuaca Harian**

Selain informasi prakiraan cuaca setiap hari, BMKG juga merilis prospek cuaca tiga harian. Di mana pada informasi tersebut dijelaskan informasi peringatan dini cuaca di seluruh wilayah Indonesia untuk tiga hari ke depan.



Gambar 1.9 Informasi Prospek Cuaca Harian

- **Prospek Cuaca Mingguan**

Bidang Meteorologi BMKG selalu memberikan informasi prakiraan cuaca mingguan. Informasi ini merangkum analisis BMKG dalam sepekan terakhir curah hujan di beberapa wilayah

di Indonesia. Di sisi lain, informasi ini juga memuat tentang kondisi dinamika atmosfer terkini.

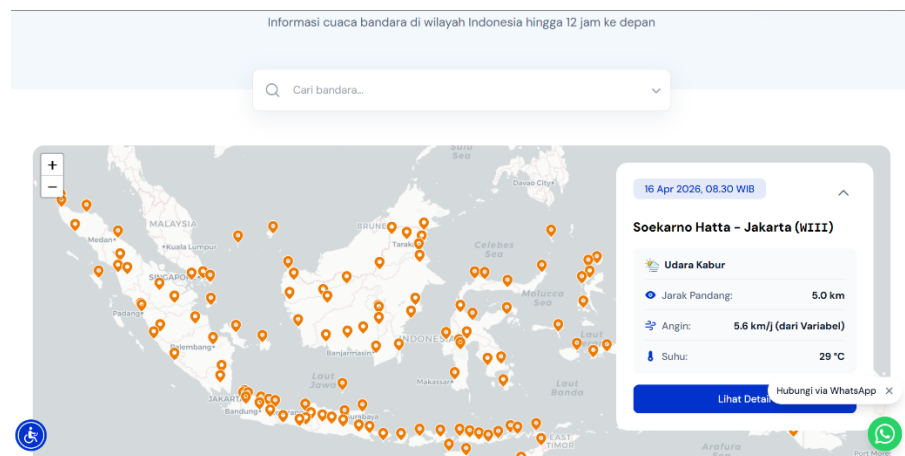


Potensi Hujan Masih Berlanjut di Tengah Penguatan Monsun Australia

Gambar 1.10 Informasi Prospek Cuaca Mingguan

- **Prospek Cuaca Penerbangan**

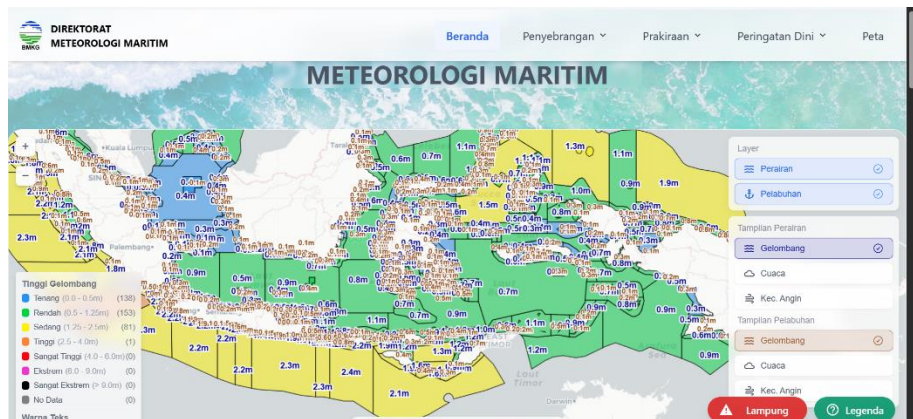
BMKG menyediakan data, informasi, dan jasa meteorologi penerbangan kepada para pengguna sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dengan tingkat akurasi tinggi dan tepat waktu. Informasi seputar cuaca penerbangan dapat diakses melalui web [aviation.bmkg.go.id](http://aviation.bmkg.go.id) atau INA-SIAM.



Gambar 1.11 Informasi Cuaca Penerbangan

- **Prospek Cuaca Maritim**

Informasi ini mencakup peringatan gelombang tinggi, prakiraan cuaca wilayah pelayanan, prakiraan tinggi gelombang, dan prakiraan cuaca pelabuhan. Informasi dapat diakses melalui BMKG-Ocean Forecast System (OFS) di web [peta-maritim.bmkg.go.id](http://peta-maritim.bmkg.go.id).

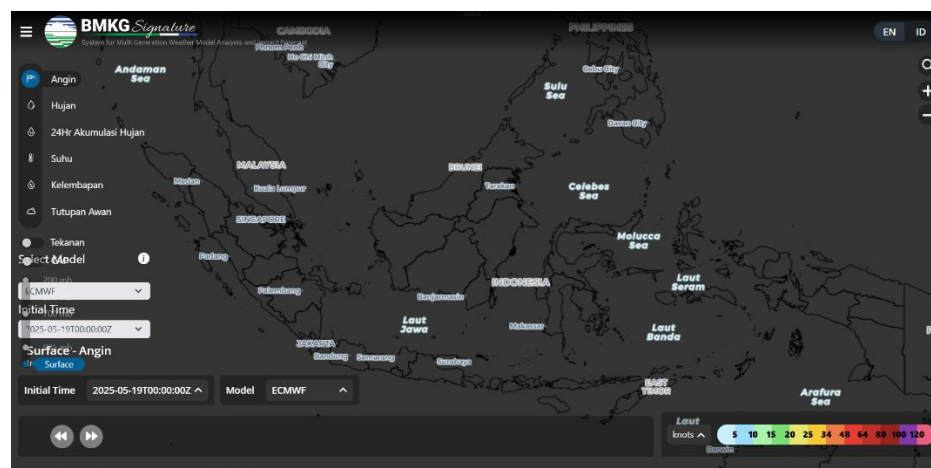


Gambar 1.12 Informasi Ketinggian Gelombang

- Prakiraan Cuaca Berbasis Dampak

BMKG memiliki sistem informasi yang disebut Prakiraan Cuaca Berbasis Dampak atau "BMKG Signature" (BMKG - System for Multi Generations Weather Model Analysis and Impact Forecast). Prakiraan berbasis Dampak merupakan lompatan inovasi untuk mendukung keselamatan global, melalui inovasi ini, BMKG tidak hanya menyediakan informasi cuaca secara umum, tetapi juga potensi dampak yang dapat ditimbulkan oleh cuaca.

"BMKGsignature" ini memiliki perbedaan dengan sistem informasi cuaca lainnya karena sistem ini sudah dilengkapi dengan informasi berbasis dampak untuk sektor kebencanaan. Sistem ini akan mengidentifikasi wilayah mana di Indonesia yang berpotensi terjadi banjir yang diakibatkan oleh hujan lebat, yang nantinya akan menampilkan peta sesuai dengan tingkat ancaman.

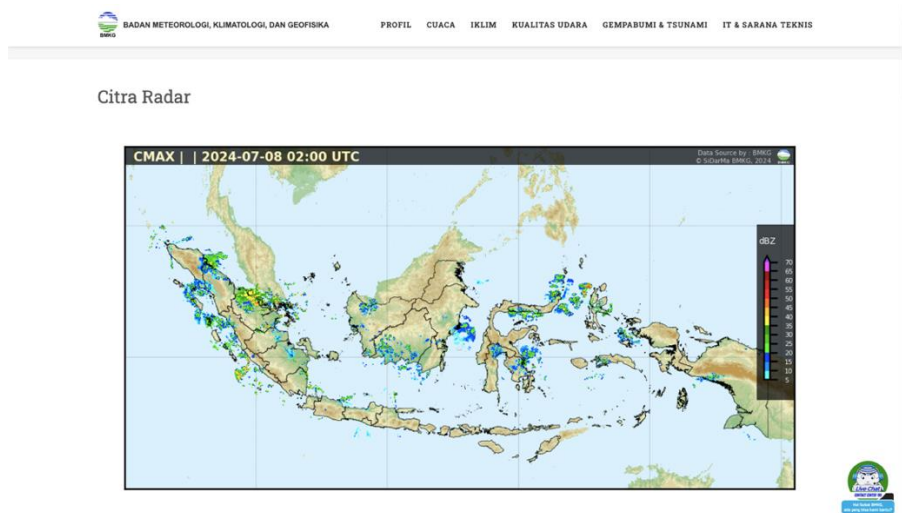


Gambar 1.13 BMKG Signature

- Citra Radar

Citra radar cuaca menggambarkan potensi intensitas curah hujan yang dideteksi oleh radar cuaca. Pengukuran intensitas curah hujan (presipitasi) oleh radar cuaca berdasarkan seberapa besar pancaran

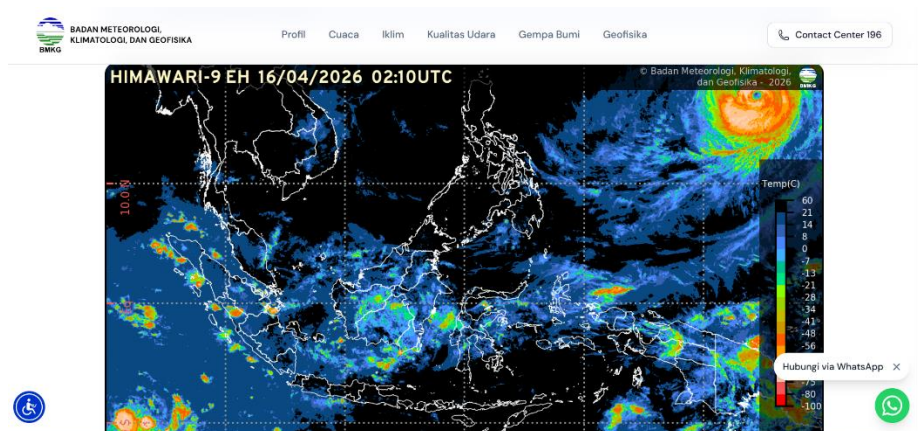
energi radar yang dipantulkan kembali oleh butiran-butiran air di dalam awan dan digambarkan dengan produk Reflectivity yang memiliki besaran satuan dBZ (decibel). Makin besar energi pantul yang diterima radar maka makin besar juga nilai dBZ, dan semakin besar nilai dBZ reflectivity menunjukkan intensitas hujan yang terjadi semakin besar. Jangkauan terjauh/maksimum produk Reflectivity dari radar BMKG adalah sekitar 240 km dari lokasi radar.



Gambar 1.14 Citra Radar

- Satelit Himawari-8 IR Enhanced

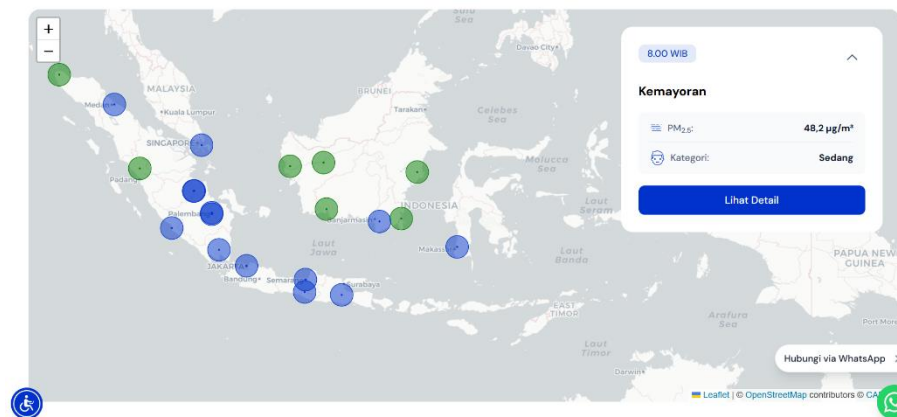
Pada produk Himawari-8 EH menunjukkan suhu puncak awan yang didapat dari pengamatan radiasi pada panjang gelombang 10.4 mikrometer yang kemudian diklasifikasi dengan pewarnaan tertentu, dimana warna hitam atau biru menunjukkan tidak terdapat pembentukan awan yang banyak (cerah), sedangkan semakin dingin suhu puncak awan, dimana warna mendekati jingga hingga merah, menunjukkan pertumbuhan awan yang signifikan dan berpotensi terbentuknya awan Cumulonimbus.



Gambar 1.15 Satelit Himawari

- Informasi Kualitas Udara Berdasarkan PM2.5

Menggambarkan kondisi kualitas udara berdasarkan sebaran konsentrasi PM2.5 per jam. Kondisi kualitas udara diberikan menurut label warna yang merujuk pada kondisi kualitas udara tertentu berdasarkan rentang konsentrasi PM2.5. Pelabelan ini dibuat berdasarkan Peraturan BMKG No. 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan BMKG No. 2 Tahun 2020 tentang Penyediaan dan Penyebaran Informasi Kualitas Udara.



Gambar 1.16 Informasi Kualitas Udara

b. Informasi Serta Merta

Informasi Serta Merta adalah informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum serta wajib diumumkan secara serta merta tanpa penundaan.

- Peringatan Dini Cuaca Ekstrem

BMKG terus mengupdate informasi terkait peringatan dini cuaca ekstrem kepada masyarakat baik melalui website maupun akun sosial media. Peringatan dini ini sangat penting agar masyarakat dapat mempersiapkan diri sebelum datangnya dampak bencana yang ditimbulkan oleh cuaca ekstrem.

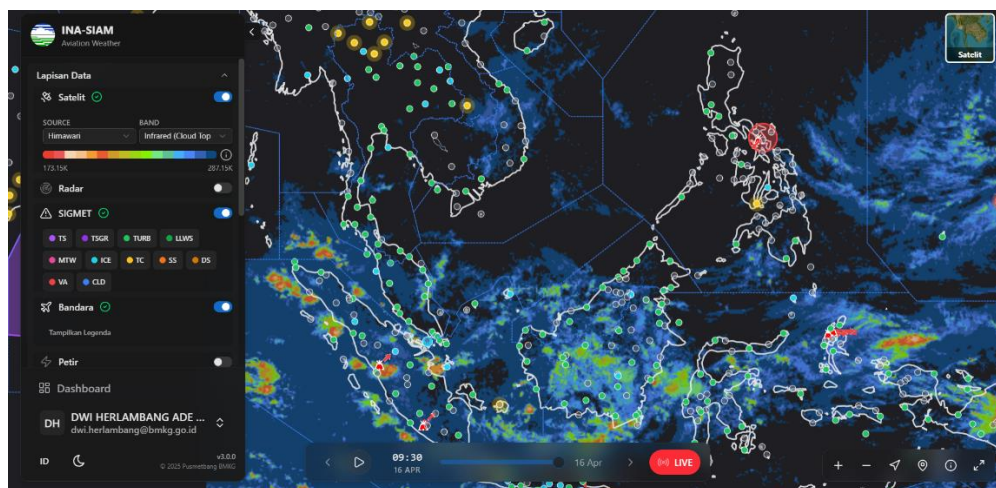


Gambar 1.17 Peringatan Dini Cuaca Ekstrem

- Informasi Peringatan Volcanic Ash

Indonesia menjadi salah satu negara di dunia dengan banyaknya gunung api aktif di dalamnya. Dalam beberapa waktu terakhir beberapa gunung di Indonesia mengalami erupsi dan mengeluarkan abu vulkanik.

Informasi peringatan abu vulkanik atau volcanic ash sangat penting bagi dunia penerbangan. Sebabnya abu vulkanik yang masuk ke mesin pesawat akan mengakibatkan kegagalan mesin pesawat dan bisa berdampak buruk.



Gambar 1.18 Peringatan Volcanic Ash

- Informasi Peringatan Gelombang Tinggi

Sebagai negara maritime terbesar dunia, informasi gelombang tinggi sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melaut. Sebagaimana diketahui, masyarakat Indonesia sangat banyak yang berprofesi sebagai nelayan.

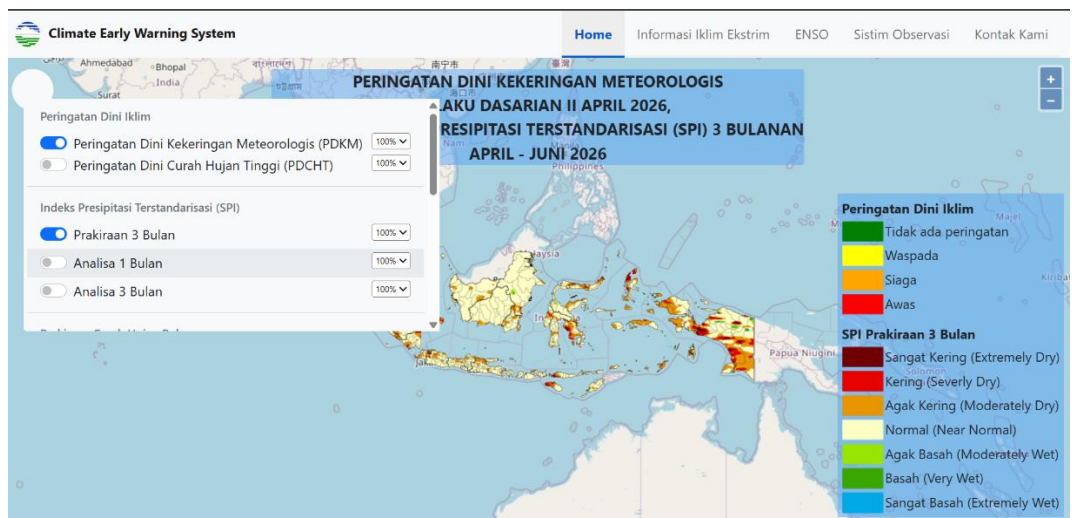
Oleh karenanya, BMKG selalu memberikan informasi peringatan dini gelombang tinggi di seluruh wilayah perairan Indonesia.



Gambar 1.19 Peringatan Gelombang Tinggi

- Peringatan Dini Kekeringan

Peringatan dini kekeringan meteorologis menjadi informasi penting bagi masyarakat. Informasi ini dapat dijadikan acuan bagi masyarakat yang daerahnya diprediksi akan mengalami kekeringan untuk bersiap dan melakukan langkah mitigasi seperti menabung air hujan dan lebih bijak dalam mengelola air.



Gambar 1.20 Peringatan Dini Kekeringan

- Informasi Konsentrasi Partikulat (PM<sub>2.5</sub>)

Particulate Matter (PM<sub>2.5</sub>) adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari atau sama dengan 2.5  $\mu\text{m}$  (mikrometer). Pengukuran konsentrasi PM<sub>2.5</sub> menggunakan metode penyinaran sinar Beta (Beta Attenuation Monitoring) dengan satuan mikrogram per meter kubik ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ). Pemantauan PM<sub>2.5</sub> yang dilakukan oleh BMKG ini baru dimulai sejak tahun 2020.



Gambar 1.21 Informasi Konsentrasi Partikulat (PM2.5)

- Peringatan Dini Gempabumi, Tsunami, dan Shakemap

BMKG terus memberikan informasi bencana alam seperti gempabumi yang suatu waktu terjadi di wilayah Indonesia. Informasi ini sangat penting untuk masyarakat mendapatkan informasi tentang kejadian gempabumi, guncangan, sumber gempabumi, dan berapa kekuatan gempabumi yang terekam oleh peralatan BMKG.

Selain itu, BMKG juga akan memberikan rekomendasi apakah gempabumi yang terjadi berpotensi tsunami atau tidak.



Gambar 1.22 Peringatan Dini Gempabumi

- Informasi Modifikasi Cuaca

Kedeputan Modifikasi Cuaca merupakan unit kerja yang relatif baru di BMKG, dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Secara lebih rinci, fungsi-fungsi Deputi Bidang Modifikasi Cuaca meliputi:

- Perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang modifikasi cuaca.
- Pelaksanaan kebijakan umum dan teknis di bidang modifikasi cuaca.
- Koordinasi kebijakan umum dan teknis di bidang modifikasi cuaca.
- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang modifikasi cuaca.
- Pemberian bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, dan pengawasan di bidang modifikasi cuaca.
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang modifikasi cuaca.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BMKG.

BMKG melaksanakan teknologi operasi Modifikasi Cuaca sebagai mitigasi bencana hidrometeorologi dan berbagai kegiatan lainnya dalam upaya mitigasi dan memperkuat peran BMKG dalam menjaga keselamatan masyarakat serta memberikan kontribusi nyata berupa informasi MKG yang akurat di Indonesia.

Pada Tahun 2025, persentase akurasi keberhasilan OMC telah tercatat sejak awal tahun dan menunjukkan kinerja yang lebih stabil dan konsisten. Nilai akurasi pada Tahun 2025 berada pada kisaran 94,8% hingga 96,6% sepanjang tahun, serta secara konsisten berada di atas capaian Tahun 2024.

## BMKG dan BNPB Gelar OMC Antisipasi Banjir Lahar Dingin Pasca Erupsi Gunung Semeru

27 November 2025 · Dwi Herlambang



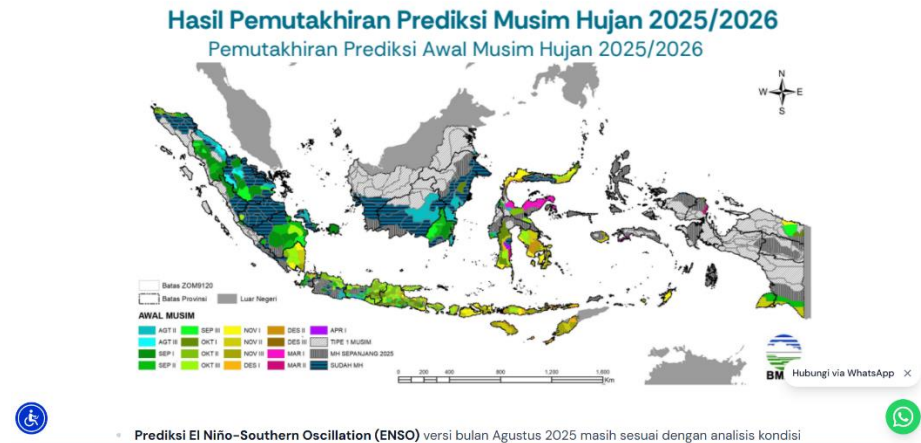
Gambar 1.23 Operasi Modifikasi Cuaca BMKG

### c. Informasi Berkala

Informasi Berkala adalah informasi yang wajib diperbaharui kemudian disediakan dan diumumkan kepada publik secara rutin atau berkala sekurang-kurangnya setiap enam bulan sekali.

- **Prakiraan Musim**

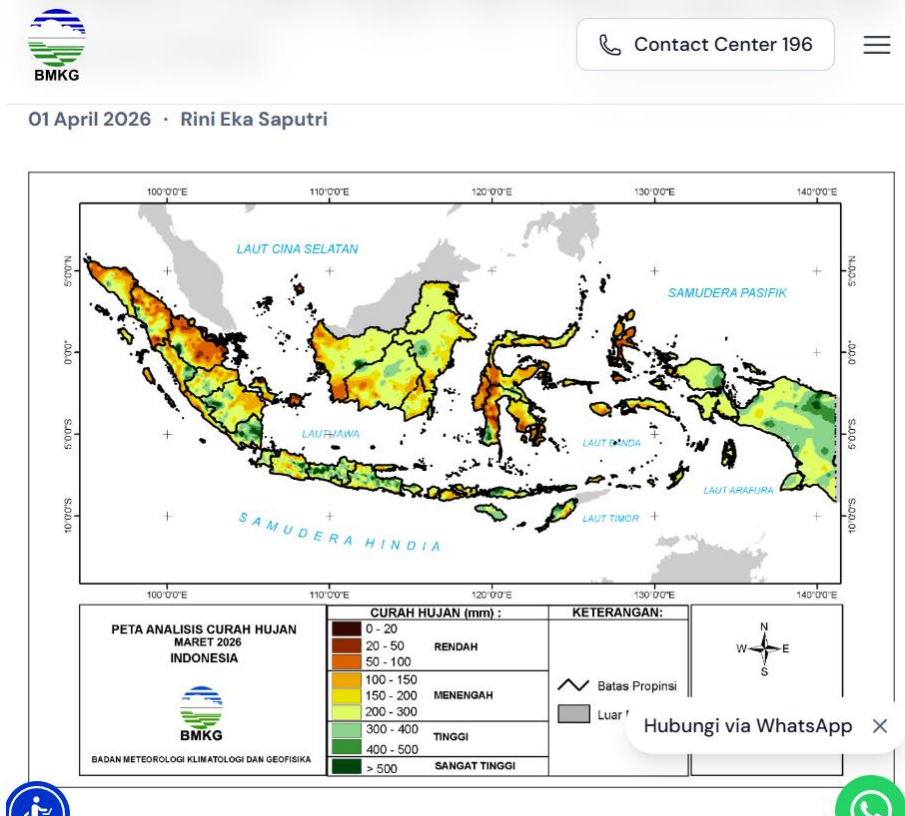
Setiap tahunnya, secara berkala, BMKG selalu memberikan informasi prakiraan Musim Kemarau dan Musim Hujan kepada masyarakat. Informasi tersebut biasanya akan disampaikan oleh Kepala BMKG melalui konferensi pers dan dapat diakses melalui website BMKG.



Gambar 1.24 Informasi Prakiraan Musim

- **Prakiraan Hujan Bulanan**

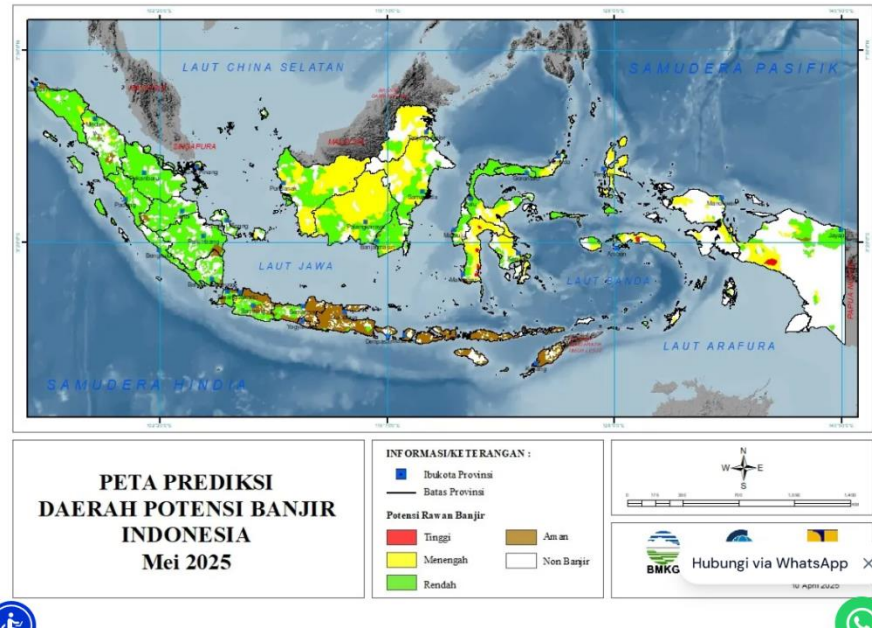
BMKG secara berkala memberikan informasi prakiraan hujan bulanan setiap dasarian. Tidak hanya prakiraan hujan, BMKG juga merilis prakiraan sifat hujan agar masyarakat tetap waspada.



Gambar 1.25 Prakiraan Hujan Bulanan

- **Potensi Banjir Bulanan**

Secara berkala BMKG merilis informasi potensi banjir bulanan di seluruh wilayah Indonesia. Informasi ini dapat dijadikan acuan bagi masyarakat dalam melakukan langkah mitigasi.



Gambar 1.26 Potensi Banjir Bulanan

- **Analisis Kejadian Iklim Ekstrem**

Analisis kejadian iklim ekstrem BMKG mengamati anomali suhu udara rata-rata bulanan. Berdasarkan analisis dari 116 stasiun pengamatan BMKG, suhu udara rata-rata bulan Desember 2025 adalah sebesar 26.86 °C (Gambar 16). Normal suhu udara klimatologis untuk bulan Desember 2025 periode 1991-2020 di Indonesia adalah sebesar 26.64 °C (dalam kisaran normal 20.80 °C – 28.97 °C).



Gambar 1.27 Analisis Kejadian Iklim Ekstrem

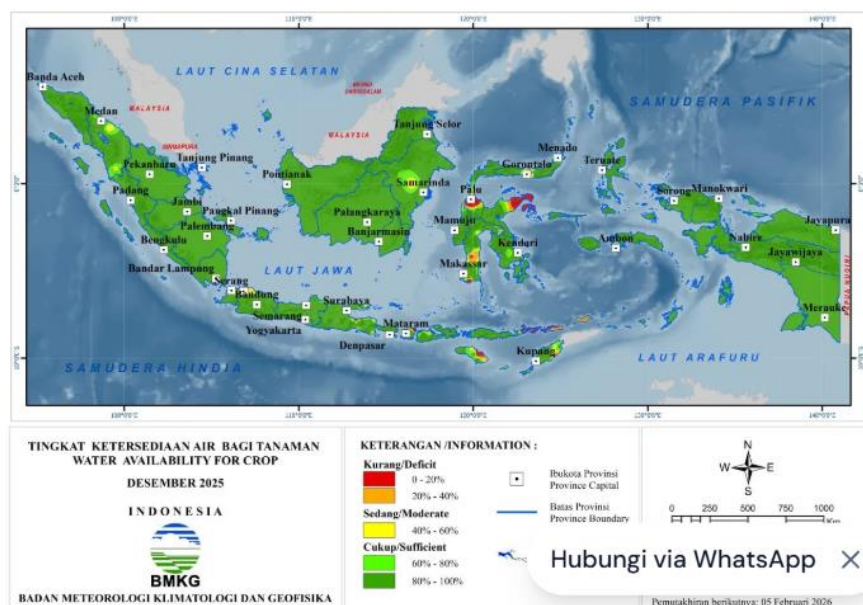
- **Informasi Agroklimat**

Informasi ini mencakup tingkat ketersediaan air tanah bagi tanaman (ATo) menggunakan perhitungan neraca air dengan metode Thornthwaite and Mather.

< [Kembali ke Ketersediaan Air bagi Tanaman](#)

## Tingkat Ketersediaan Air Bagi Tanaman – Desember 2025

02 Januari 2026 · Rini Eka Saputri



Gambar 1.28 Informasi Agroklimat

- **Informasi Perubahan Iklim dan Informasi Kualitas Udara**

Informasi kualitas udara berisikan informasi tentang kondisi udara pada level tidak sehat, sangat tidak sehat, dan berbahaya berdasarkan konsentrasi PM10.

### Informasi Konsentrasi Partikulat (PM<sub>10</sub>)

Partikulat (PM<sub>10</sub>) adalah Partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 10 mikron (mikrometer).

Nilai Ambang Batas (NAB) adalah Batas konsentrasi polusi udara yang diperbolehkan berada dalam udara ambien. NAB PM<sub>10</sub> = 150 µgram/m<sup>3</sup>.

Keterangan:



### Informasi Iklim

Tingkat Ketersediaan Air Bagi Tanaman - Juni 2024  
05 Jul 2024  
#Klimatologi #Ketersediaan Air Tanah

Analisis Dinamika Atmosfer Dasarian III Juni 2024  
03 Jul 2024  
#Klimatologi #Dinamika Atmosfer

Fakta Perubahan Iklim Juni 2024  
02 Jul 2024  
#Klimatologi #Fakta Perubahan Iklim

Anomali Suhu Udara Bulan Juni 2024

Gambar 1.29 Informasi Kualitas Udara

## d. Informasi yang Dikecualikan

Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Di BMKG, informasi yang dikecualikan adalah sebagai berikut;

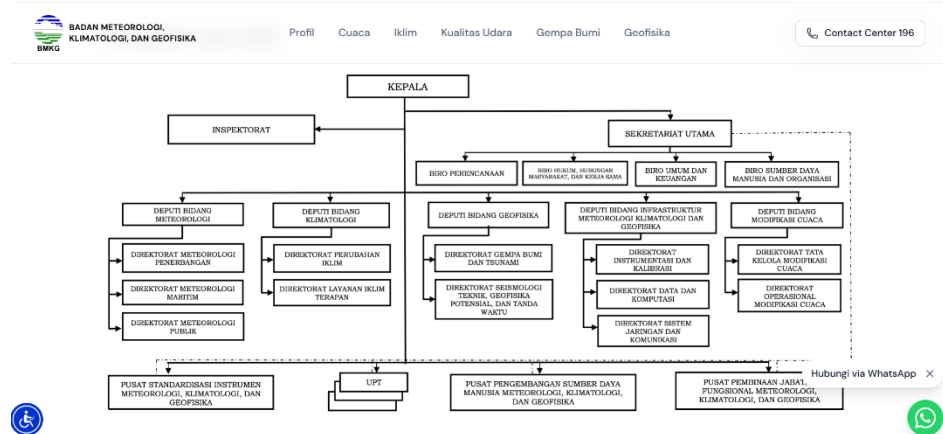
- Data mentah MKG yang diperoleh dari pengamatan langsung baik manual maupun otomatis.
- Metode analisis atau model yang masih dalam taraf penelitian dan pengembangan.
- Gambar yang meliputi detail jalur-jalur mekanikal elektrik, spesifikasi material atau peralatan mekanikal elektrik di gedung bmgk, jalur perkabelan atau data dari radar antena.

## D. Bidang Administrasi

### a. Informasi Setiap Saat

- **Informasi Tentang Organisasi, Kepegawain, Peraturan, Keputusan, dan Kebijakan BMKG.**

Secara transparan, BMKG selalu mengunggah informasi mengenai organisasi, kepegawain, peraturan, keputusan, dan kebijakan BMKG di website dan dapat diakses oleh masyarakat.



Gambar 1.30 Struktur Organisasi

- **Laporan Keuangan**

Sebagaimana diamanatkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BMKG merupakan lembaga pemerintah sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan. Sebagai bentuk transparansi kepada publik, masyarakat bisa mengaksesnya melalui website BMKG.

Realisasi penyerapan anggaran BMKG TA. 2024 untuk semua jenis belanja sebesar Rp2.398.081.747.731,- atau 99,05% dari total pagu sebesar Rp2.421.104.850.000.

**Rp2.398.081.747.731**

Realisasi penyerapan anggaran BMKG TA. 2025

**Rp2.421.104.850.000**

Pagu anggaran BMKG TA. 2025

**99,05%**



Gambar 1.31 Laporan Keuangan BMKG Tahun 2025

- **Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)**

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI. No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kepala Stasiun sebagai Pengguna Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan Barang Milik Negara yang dipimpinnya. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) adalah salah satu entitas yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi pertanggungjawaban pelaksanaan anggarannya dengan menyusun laporan Barang Milik Negara disertai Catatan atas Laporan Barang Pengguna.



## BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Jl. Angkasa I No. 2, Jakarta 10610, Telp : (62) 21 4246321 Fax : (62) 4246703  
P. O. BOX 3540 JKT, Website : <http://www.bmkg.go.id> Email : [info@bmkg.go.id](mailto:info@bmkg.go.id)

Nomor : e.B/PL.08.02/001/SU/II/2025 Jakarta, 28 Februari 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Hal : Pengantar Laporan BMN Tahunan Tahun 2024

Yth. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara  
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia  
di  
Jakarta

Merujuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, disebutkan bahwa Penanggung Jawab UAPB (Unit Akuntansi Pengguna Barang) wajib menyampaikan Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun 2024, Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun 2024 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang disampaikan kepada Kantor Pusat DJKN, serta surat dari a.n Direktur Jenderal Kekayaan Negara - Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara nomor S-135/KN/KN.2/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Penyampaian Laporan Barang Pengguna Tahun 2024, maka bersama ini kami sampaikan Laporan Barang Pengguna Tahunan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun Anggaran 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Pengguna Barang  
Plt. Sekretaris Utama,



Gambar 1.32 Laporan BMN BMKG

- **Rencana Strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pimpinan kementerian/lembaga menetapkan peraturan mengenai rencana strategis kementerian/lembaga setelah disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional.



PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG  
RENCANA STRATEGIS BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN  
GEOFISIKA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Rencana Strategis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2025-2029;

Gambar 1.33 Renstra BMKG 2025-2029

Sementara itu, LAKIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab BMKG khususnya dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang MKG sepanjang tahun dan merupakan wujud kinerja dalam pencapaian visi dan misi BMKG sebagaimana dijabarkan dalam Renstra Tahun 2025-2029.

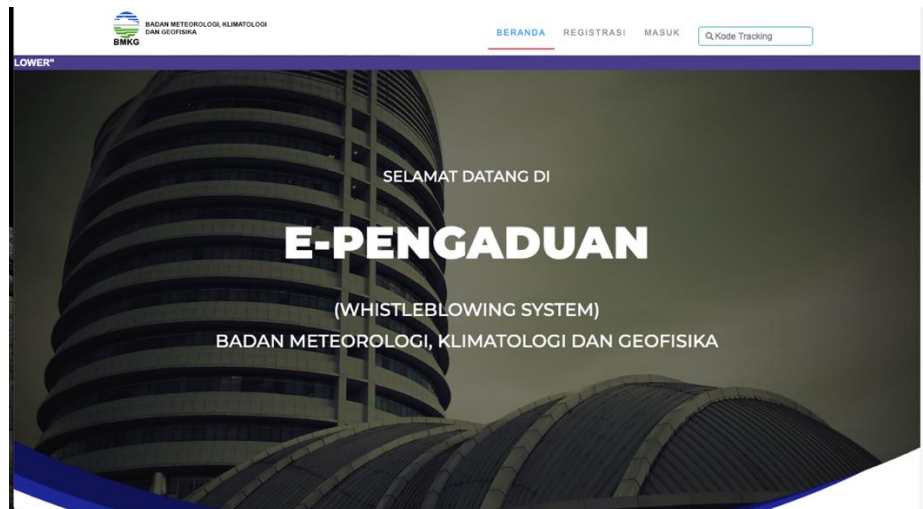


Gambar 1.34 LAKIP 2025

- **Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)**

Dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, salah satunya diperlukan kondisi/keadaan dalam pelaksanaan tugas pokok BMKG yang terbebas dari adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Whistleblowing System (WBS) adalah sistem pelaporan pelanggaran yang memungkinkan peran aktif pegawai dan pihak eksternal organisasi untuk menyampaikan pengaduan mengenai tindakan pelanggaran dan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai BMKG.



Gambar 1.35 WBS BMKG

- **Informasi Pengumuman dan Pelatihan**

Dalam rangka peningkatan kapasitas SDM, BMKG selalu memberikan pengembangan kompetensi melalui pelatihan yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM).

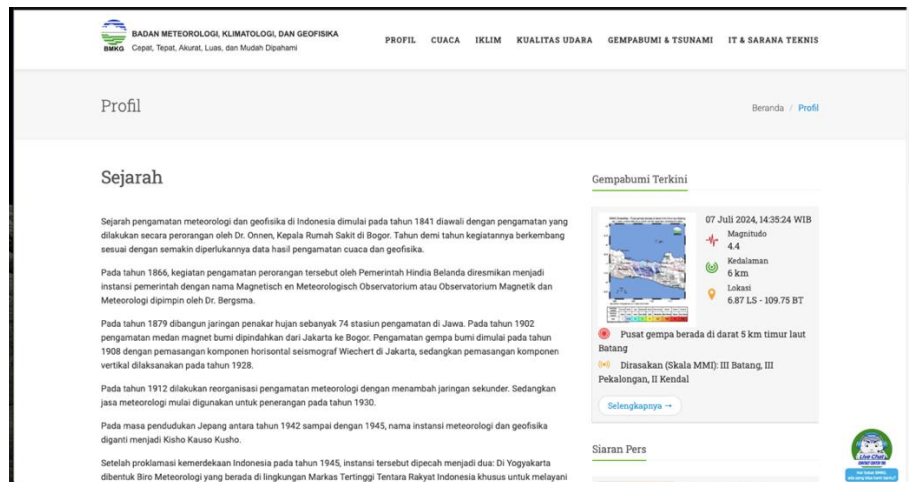
BMKG memiliki Program SDM Unggul, merupakan bonus demografi yang memerlukan pengelolaan dengan sebaik-baiknya melalui pengembangan potensi dan kapasitasnya secara optimal untuk kemajuan organisasi di tingkat dunia, salah satu strateginya adalah melalui pendidikan dan pelatihan. Dari sisi pendidikan, BMKG menargetkan akan tersedia 500 doktor berkualitas pada tahun 2030 yang akan sangat berguna bagi pengembangan kinerja berbagai unit di BMKG.

**b. Informasi Berkala**

- **Informasi Profil BMKG**

Sejarah pengamatan meteorologi dan geofisika di Indonesia dimulai pada tahun 1841 diawali dengan pengamatan yang dilakukan secara perorangan oleh Dr. Onnen, Kepala Rumah Sakit di Bogor. Tahun demi tahun kegiatannya berkembang sesuai dengan semakin diperlukannya data hasil pengamatan cuaca dan geofisika.

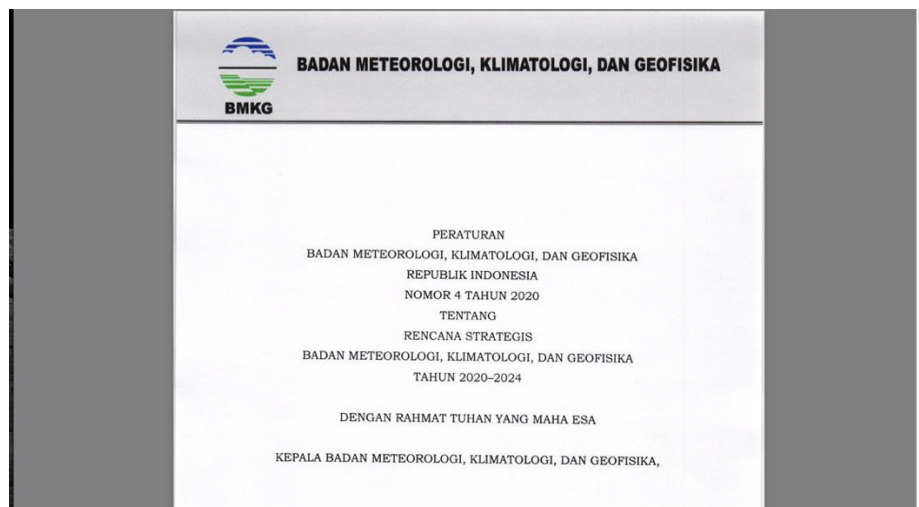
Untuk masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut informasi tentang sejarah dan profil BMKG dapat mengaksesnya melalui website [bmgk.go.id](http://bmgk.go.id).



Gambar 1.36 Profil BMKG

- **Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau yang Sedang Dijalankan dalam Lingkup BMKG**

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pimpinan kementerian/lembaga menetapkan peraturan mengenai rencana strategis kementerian/lembaga setelah disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional.



Gambar 1.37 Informasi Program yang Sedang Dijalankan BMKG

- **Ringkasan Informasi tentang Kinerja dalam Lingkup BMKG**

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program, kegiatan dan penggunaan anggaran serta penggunaan seluruh sumber daya dengan menerapkan strategi pelaksanaan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis BMKG 2025–2029 dan RPJMN 2025–2029.



Gambar 1.38 Lakip BMKG

- **Laporan Keuangan**

BMKG merupakan lembaga pemerintah sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.



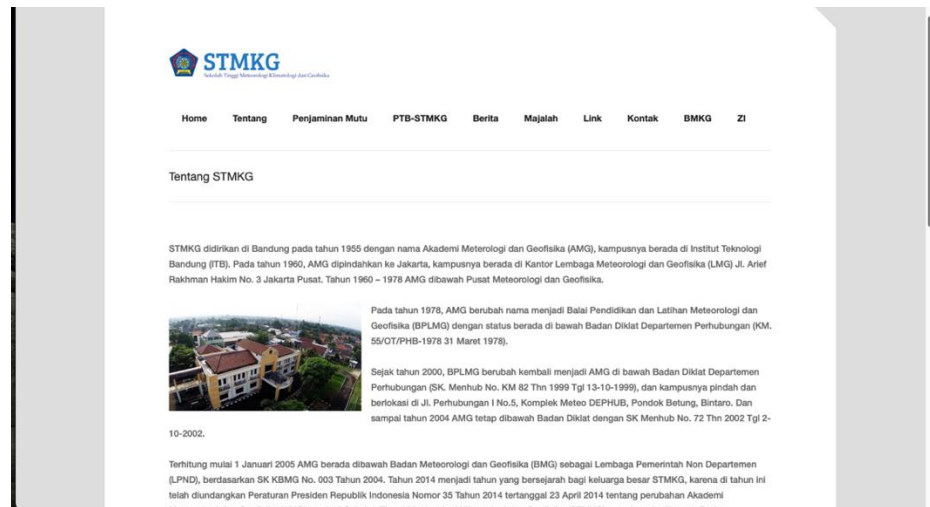
Gambar 1.39 Laporan Keuangan

- **Profil STMKG**

STMKG didirikan di Bandung pada tahun 1955 dengan nama Akademi Meterologi dan Geofisika (AMG), kampusnya berada di Institut Teknologi Bandung (ITB). Pada tahun 1960, AMG dipindahkan ke Jakarta, kampusnya berada di Kantor Lembaga Meteorologi dan Geofisika (LMG) Jl. Arief Rakhman Hakim No. 3

Jakarta Pusat. Tahun 1960 – 1978 AMG dibawah Pusat Meteorologi dan Geofisika.

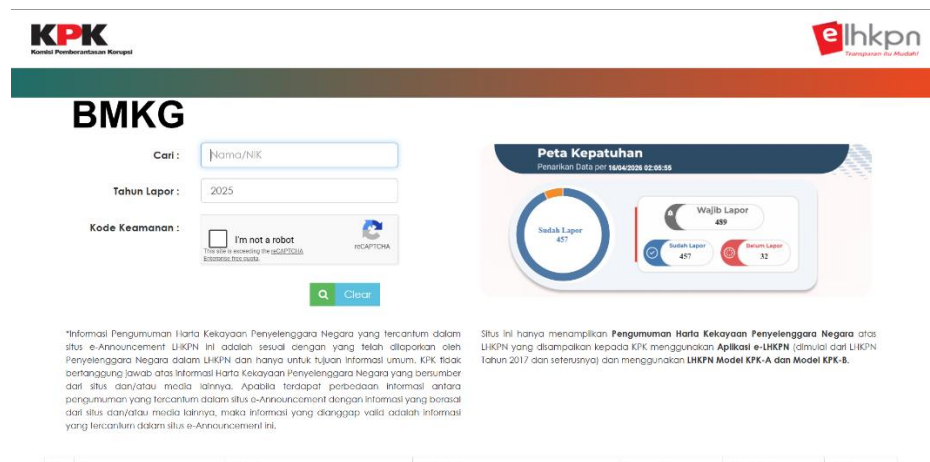
Untuk selengkapnya bisa mengunjungi laman [stmkg.ac.id](http://stmkg.ac.id).



Gambar 1.40 Profil STMKG

- **LHKPN**

LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaannya. Tujuan dari pembuatan LHKPN adalah sebagai bagian dari wewenang yang dimiliki KPK yaitu melaksanakan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi antara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.



Gambar 1.41 LHKPN BMKG

### c. Informasi yang Dikecualikan

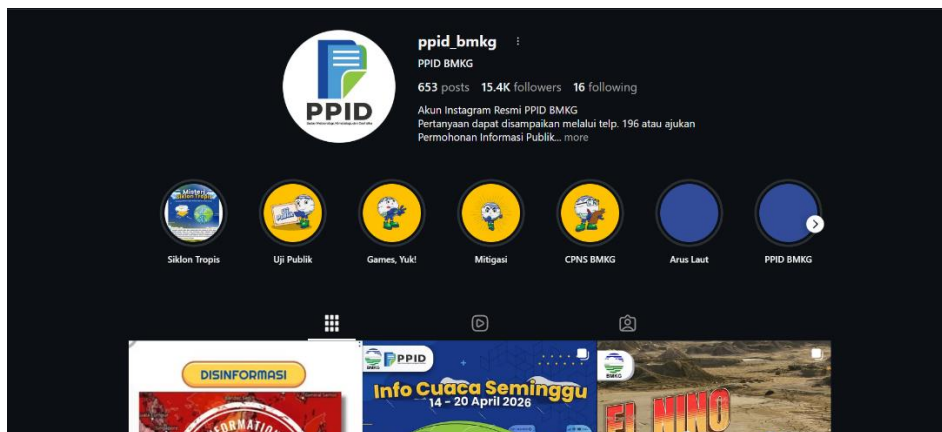
- Naskah dinas yang sifatnya rahasia.
- Dokumen keuangan meliputi kuitansi, surat perintah pembayaran, surat permintaan membayar, surat perintah pencairan dana, data rekonsiliasi, dan POK.
- Data kepegawaian yang bersifat pribadi.
- Hasil pengawasan yang dilakukan APIP.
- Dokumen pengadaan BMN.

## C. Bidang Pengelolaan Informasi

### • Media Sosial

Penggunaan media sosial untuk instansi pemerintah telah menjadi alat yang efektif untuk berbagai tujuan baik untuk internal maupun eksternal organisasi. Pun, BMKG membuat akun Instagram PPID BMKG dengan tujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Saat ini Instagram PPID BMKG memiliki pengikut sebanyak 15.400 akun dan terintegrasi dengan akun Instagram InfoBMKG yang memiliki pengikut sebanyak 5,9 juta akun. Melalui Instagram PPID BMKG, hal ini menjadi saluran untuk menyampaikan informasi publik secara cepat dan mudah dipahami. Mulai dari kebijakan baru, program pemerintah, hingga laporan kinerja dapat dibagikan melalui visual yang menarik.



Gambar 1.42 Instagram PPID BMKG

### • Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik BMKG Tahun 2024 (PPID)

Keberadaan dan evaluasi PPID sangat penting karena merupakan implementasi dari UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Evaluasi PPID berfungsi sebagai indikator keterbukaan informasi publik, yang menunjukkan tingkat transparansi dan akuntabilitas di lembaga tersebut. Selain itu, hasil evaluasi ini juga menjadi ukuran dalam penilaian reformasi birokrasi, terutama pada sektor layanan publik dan akuntabilitas. Dengan demikian, PPID berperan penting dalam memastikan akses informasi yang terbuka dan

terpercaya bagi masyarakat, serta mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada badan publik tahun 2025, BMKG berhasil meningkatkan kategori penilaian dari Menuju Informatif dengan total skor 83,83 pada tahun 2024 menjadi **Informatif** dengan skor 95,60.

Pencapaian ini menunjukkan komitmen BMKG untuk terus meningkatkan transparansi informasi kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan antara lain penguatan sistem pengelolaan informasi publik, peningkatan kualitas layanan informasi, serta optimalisasi media komunikasi dan publikasi.

Ke depan, BMKG bertekad untuk lebih meningkatkan keterbukaan informasi publik dengan memperkuat kolaborasi dan inovasi dalam penyediaan layanan informasi. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya, BMKG dapat mencapai kategori Informatif sesuai standar yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat.

18.	KOMISI YUDISIAL	97.44
19.	MAHKAMAH AGUNG	97.43
20.	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	97.40
21.	RADIO REPUBLIK INDONESIA	97.35
22.	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN	97.00
23.	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	96.87
24.	MAHKAMAH KONSTITUSI	96.85
25.	BADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	96.85
26.	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	96.67
27.	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	96.40
28.	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan	95.99
29.	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	95.85
30.	BADAN GIZI NASIONAL	95.81
31.	<b>BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA</b>	<b>95.60</b>
32.	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	95.53
33.	LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN	94.91
34.	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	93.35
35.	BADAN PANGAN NASIONAL	91.24

Gambar 1.43 Predikat Informatif PPID BMKG

## E. Rincian Pelayanan Permohonan

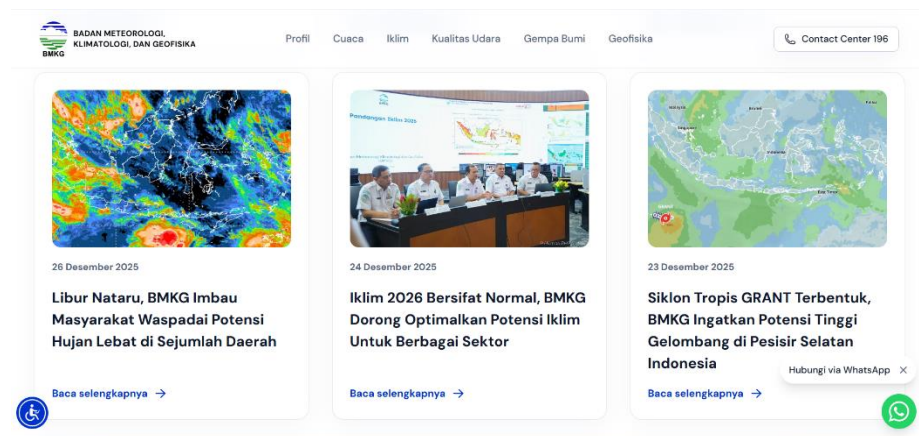
- **Kunjungan Eksternal**

Sementara itu, Humas memfasilitasi publik yang berkunjung ke BMKG dari berbagai tingkat profesi, akademik (TK-Universitas), dan komunitas, baik dari dalam maupun luar negeri, serta berbagai instansi/kementerian/lembaga terkait secara virtual maupun tatap muka. (sesuai protokol kesehatan).Hingga Desember 2025, Humas BMKG telah memfasilitasi kegiatan kunjungan publik sebanyak 56 kali dengan total 2.268 peserta.

- **Framing Berita dan Press Release**

Monitoring Pemberitaan Media hingga Desember 2025, tercatat sebanyak 31.164 berita di media cetak dan online terkait BMKG yang berskala lokal, regional, hingga nasional. Sementara pemantauan *running text* atau *newsticker* dari media elektronik (TV) untuk pemberitaan terkait cuaca, iklim, dan gempa hingga bulan Desember 2025 berjumlah kurang lebih 5.467 berita (pada realisasinya banyak televisi yang mengekspos *newsticker* atau *running text* dan berulang-ulang ditayangkan/*repost*).

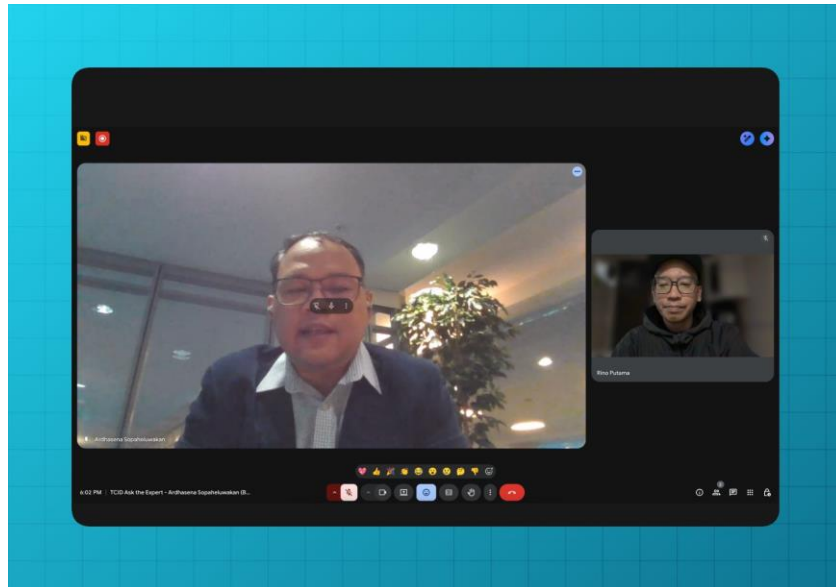
Humas BMKG melaksanakan media publikasi melalui Kanal Berita Video 20 Detik untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada masyarakat luas, baik dalam bentuk media (visual), maupun dalam bentuk multimedia (audio dan visual). Selama tahun 2025 sebanyak 145 multimedia.



Gambar 1.44 Publikasi BMKG

- **Wawancara Media**

Memfasilitasi kegiatan peliputan dari rekan-rekan media massa baik cetak, elektronik, maupun online. Hingga Desember 2025, HPM telah memfasilitasi Peliputan media kurang lebih 273 media massa cetak, elektronik, dan online. Selain itu, juga memfasilitasi wawancara yang bersifat *in depth interview* dan bersifat khusus dengan Media TV sebanyak 91 kali.



Gambar 1.47 Layanan Wawancara Media

- **Layanan Informasi Melalui Running Text**

Sementara pemantauan running text atau newsticker dari media elektronik (TV) untuk pemberitaan terkait cuaca, iklim, dan gempa hingga bulan Desember 2025 berjumlah kurang lebih 5.467 berita (pada realisasinya banyak televisi yang mengekspos *newsticker* atau *running text* dan berulang-ulang ditayangkan/*repost*).

- **Pengelolaan Media Sosial**

1. **X @InfoHumasBMKG**

Jumlah *post* yang disebarakan melalui akun X @InfoHumasBMKG baik yang berkaitan dengan bidang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, maupun yang berupa konten kreatif (kuis, ucapan hari besar nasional, video,tips, dsb) selama 2025 sebanyak 2.531 kali. Sedangkan jumlah *followers* sampai dengan Desember 2025 sebanyak 189.272. Sementara berdasarkan survei yang dilakukan oleh Humas, dapat terlihat bahwa X @InfoHumasbmgk mendapatkan respon positif dari para *followers* baik dari segi bahasa, kemasan isi, serta respon yang diberikan Humas. X @infohumasbmgk pun telah terdata di group medsos kementerian/lembaga yang dikoordinasi oleh Kemensetneg dan KSP. Akun X @infoHumasBMKG pun telah diikuti oleh beberapa K/L dan akun pribadi pejabat pemerintahan, seperti Sekretaris Kabinet, Sekretariat Negara, Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara RI, Kementerian Koordinator Kemaritiman RI, dan lain-lain.

2. **TikTok @InfoBMKG**

Akun TikTok @InfoBMKG merupakan sebuah media penyebaran informasi baru yang dimiliki BMKG. Akun ini dibuat sebagai wujud adaptasi BMKG terhadap perkembangan new media di Indonesia dengan harapan agar lebih banyak menjangkau publik dari berbagai

kalangan. Akun ini dibuat sejak Agustus 2019 dan hingga 31 Desember 2025 TikTok InfoBMKG telah memiliki 503,400 followers dengan jumlah video yang diposting selama 2025 sebanyak 62 postingan, serta telah mendapat 1.726.321 likes. Berbeda dengan akun media sosial lainnya yang dimiliki BMKG, akun TikTok BMKG lebih mengutamakan konten yang bersifat *entertaining* atau menghibur karena para pengguna TikTok rata-rata adalah usia remaja hingga dewasa awal yang lebih tertarik dengan konten-konten bersifat menghibur. Hal ini tentunya menjadi tantangan baru bagi Humas untuk membuat konten yang dapat diterima publik namun tetap informatif dan edukatif serta membangun citra positif kelembagaan.

### **3. WhatsApp Channel BMKG**

WhatsApp Channel adalah saluran komunikasi yang memungkinkan suatu perusahaan, instansi, komunitas, atau entitas lainnya untuk berinteraksi dengan pelanggan atau audiens mereka melalui aplikasi WhatsApp. Dengan WhatsApp Channel, informasi, edukasi, notifikasi, penawaran spesial, atau dukungan pelanggan dapat disampaikan langsung melalui pesan teks, gambar, atau media lainnya. WhatsApp Channel menciptakan jalur komunikasi yang langsung dan cepat antara pemilik Channel dan pengguna, meningkatkan keterlibatan, dan mempermudah pertukaran informasi.

Hingga 31 Desember 2025, WhatsApp Channel BMKG memiliki pengikut berjumlah 6.377.538 followers. Informasi yang disajikan dalam WhatsApp Channel BMKG terdiri dari informasi seputar cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi, siaran pers, kegiatan pimpinan BMKG, serta konten edukatif.

WhatsApp Channel BMKG juga terbukti dapat menaikkan jumlah kunjungan pada website BMKG serta engagements di media sosial BMKG sebesar lebih dari 100%.

### **4. Konten Video (IG, YouTube)**

Publikasi BMKG melalui Video yang dipublikasikan di Media Sosial "InfoBMKG", sebanyak 340 buah. Beberapa video yang dibuat Adalah informasi mengenai edukasi, literasi, dan seluruh layanan BMKG.

### **5. Konten Narasi / Infografis**

Membuat infografis dan visual desain untuk mendukung penyebaran informasi dari BMKG agar lebih menarik dan mudah diterima publik. infografis, videografis, dan visual desain ini dapat berupa informasi seputar MKG maupun kegiatan di BMKG salah satunya seperti siaran pers, ucapan hari besar nasional, kuis, tips, dan konten kreatif lainnya. Hingga 2025, Humas khususnya Sub Bagian HPM telah

memproduksi kurang lebih 950 infografis, 68 videografis, 29 visual design.



Gambar 1.49 Konten Infografis BMKG

## 6. Penghargaan

Mendapat dua penghargaan dalam ajang *Government Social Media (GSM) Award 2025*, yaitu *Most Active Lembaga* dan *Best Account Lembaga*. Penghargaan *Most Active Lembaga* diberikan atas keaktifan dan konsistensi BMKG dalam menyampaikan informasi MKG serta membangun interaksi dengan masyarakat melalui berbagai platform media sosial. Sementara itu, penghargaan *Best Account Lembaga* merupakan bentuk apresiasi atas kualitas pengelolaan akun media sosial BMKG yang dinilai unggul secara kumulatif dibandingkan lembaga pemerintah lainnya.





Gambar 1.50 Penghargaan GSMS BMKG

Mendapat Juara 1 Anugerah Media Humas (AMH) 2025 kategori Siaran Pers Online yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dengan judul “*BMKG: 2024 Jadi Tahun Terpanas Sepanjang Sejarah, Perubahan Iklim Kian Membahayakan Kesehatan Publik*”. Penghargaan ini diberikan atas kualitas dan efektivitas siaran pers BMKG dalam menyampaikan informasi strategis kepada publik secara cepat, akurat, dan berdampak luas.



Gambar 1.51 Penghargaan AMH 2025

Berhasil meraih predikat Badan Publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk kategori Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian. BMKG memperoleh skor 95,60, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan pengelolaan layanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BMKG yang semakin optimal, baik dari aspek ketersediaan dan kemudahan akses informasi, kualitas pelayanan permintaan informasi publik, maupun inovasi dan sosialisasi keterbukaan informasi.



Gambar 1.52 Predikat Informatif BMKG